



## **KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG**



### **Pemerintah Kabupaten Sampang Kecamatan Sampang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

**BAB I                   PENDAHULUAN**

- A. Umum
- B. Struktur Organisasi
- C. Isu Strategis
- D. Cascading Kinerja (Keterhubungan Dengan RPJMD)
- E. Peta Proses Bisnis

**BAB II                   PERENCANAAN KINERJA**

- A. Rencana Strategis
- B. Penetapan Kinerja Tahun 2023

**BAB III                 AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

**BAB IV                 PENUTUP**

**LAMPIRAN 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

**LAMPIRAN 2. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2023**



**IKHTISAR EKSEKUTIF**

Sebagai unsur pelaksana pelaksana, Pemerintah Kabupaten Sampang dalam urusan pemerintahan dengan skala lebih kecil maka Kecamatan Sampang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan adalah untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat secara lebih luas, yang meliputi: 1. Pelayanan di Bidang Umum, 2. Pelayanan di Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Umum, 3. Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, dan 4. Pelayanan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban.

Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Sampang, digambarkan dengan capaian 4 (empat) sasaran, yang pada intinya adalah ingin dicapainya pelayanan prima kepada masyarakat, yaitu sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran yaitu meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa yang capaiannya adalah 20% dari target yang telah ditetapkan yaitu 20%.
2. Capaian Sasaran yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik yang capaiannya adalah 81,55 atau 100% dari target yang telah ditetapkan
3. Capaian Sasaran yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang capaiannya adalah 100% atau 100% dari target yang telah ditetapkan
4. Capaian Sasaran yaitu meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik yang capaiannya adalah 20% atau 100% dari target yang telah ditetapkan.

Dalam capaian tersebut tentunya terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, namun kami telah mengambil langkah-langkah penyempurnaan yaitu dengan melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan dengan melakukan evaluasi internal dan eksternal pelayanan melalui monitoring, evaluasi, serta pemenuhan sarana dan prasarana maupun perbaikan teknis pelayanan yang kesemuanya bertujuan untuk memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat Kecamatan Sampang.



## KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

### KATA PENGANTAR

Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi public dewasa ini. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk :

1. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja;
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Kami menyadari banyak kelemahan dan kekurangan yang harus kami benahi dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sampang Tahun 2023. Semoga dengan tersusunnya laporan ini dapat memberikan informasi tentang pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Sampang dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi.

Sampang, 01 Maret 2023

**CAMAT SAMPANG**

**Moh. Hanafi, S.Sos, MM**  
NIP. 197708161996021001



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. UMUM**

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwiibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sampang Tahun 2020, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sampang(Setda) sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Sampang dalam kerangka integrasi perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Sampang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sampang Tahun 2023, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sampang sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Sampang dalam kerangka integrasi perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Sampang.



## KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban yang persfektif transparansi dan akuntabilitas.

Paradigma ini merupakan suatu langkah baru yang harus disikapi oleh semua pihak dalam mempertanggungjawabkan segala kinerja yang telah dilaksanakan dalam kondisi saat sekarang, dimana Pemerintah dituntut untuk bersikap transparan dalam melaksanakan kegiatan serta penggunaan dananya sebagai dampak ekonomi yang terjadi dengan suatu proses yang dilakukan oleh bagian Organisasi dengan indikator keberhasilan : nilai input, output dan outcome yang selanjutnya mengarah pada tercapainya benefit dan impact.

Berikut adaah beberapa strategi pembangunan Kabupaten Sampang seperti yang tertuang didalam Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2022-2024 yang didukung oleh Kecamatan Sampang yaitu :

” Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik dan bersih melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (e-government) secara terpadu “.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Bupati Sampang memberikan tugas kepada Camat Sampang melalui Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Kecamatan/Kelurahan di Kabupaten Sampang untuk membantu Bupati dalam melaksanakan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya camat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan program serta kebijakan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- b. Pengelolaan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati;
- c. Pemberian pelayanan tata usaha keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan serta pembinaan politik dalam negeri;



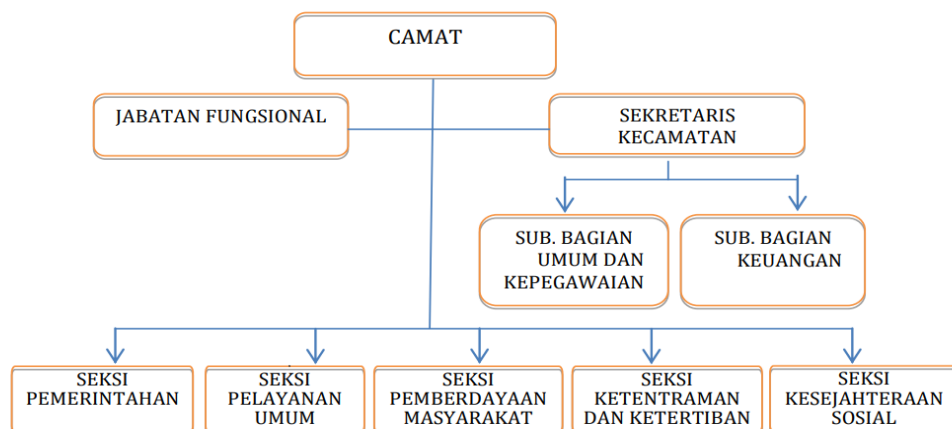
## KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

- e. Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- f. Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- g. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi di wilayah Kecamatan; i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

### B. STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SAMPANG

Susunan Organisasi Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang sesuai dengan Keputusan Bupati Sampang Nomor : 72 Tahun 2016 adalah terdiri dari:

- 1) Camat
- 2) Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
- 3) Seksi Pemerintahan
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- 6) Seksi Kesejahteraan Sosial
- 7) Seksi Pelayanan Umum dan Informasi dengan bagan sebagai berikut :





## **KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG**

### **TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SAMPANG**

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Kecamatan mempunyai tugas:

- v Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- v Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- v Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- v Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- v Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- v Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- v Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- v Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
- v Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- v Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Uraian dari Susunan Organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

#### **Sekretariat Kecamatan**

Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- ♣ Penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
- ♣ Pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
- ♣ Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan Kecamatan;
- ♣ Pelaksanaan urusan rumah tangga kecamatan;
- ♣ Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat kerja terkait;
- ♣ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :



## **KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG**

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan.

**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
- c. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- e. Menyiapkan bahan untuk penghapusan dan inventarisasi barang;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi naskah dinas,
- g. Melakukan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta hubungan masyarakat,
- h. Menyelenggarakan urusan pemeliharaan kebersihan, keindahan kantor dan keamanan,
- i. Menyiapkan sarana dan prasarana rapat dinas, sarasehan, seminar, acara pembinaan, upacara dan kunjungan kerja,
- j. Melakukan upaya peningkatan dan pengawasan disiplin pegawai, dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

**Sub Bagian Keuangan** mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian keuangan dan program;
- b. Menghimpun bahan perencanaan program dan anggaran;
- c. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- d. Melaksanakan verifikasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. Melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji pegawai.
- f. Menyetujui usulan pembayaran keuangan yang diajukan pelaksana kegiatan, dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### **Seksi Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan kecamatan.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa / kelurahan
- d. Melaksanakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;





## **KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG**

- e. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan;
- f. Melakukan pembinaan teknis administrasi pertanahan / keagrariaan;
- g. Menyusun program pembinaan Sosial Politik dan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa ;  
dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat

### **Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- b. Melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban ;
- c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- e. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum
- f. Melaksanakan penanggulangan dini gangguan ketentraman dan ketertiban;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum ;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat ; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. menyusun program dan pembinaan pengembangan kemampuan sumber daya masyarakat, akses modal dan pemasaran;
- c. menyusun program dan pembinaan bidang produksi dan distribusi hasil produksi;
- d. menyusun program dan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi untuk meningkatkan kehidupan pembangunan perekonomian masyarakat;
- e. menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup;
- f. menyusun program dan pembinaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;



## **KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG**

- g. menyusun program dan pembinaan pembangunan fisik wilayah masyarakat Desa/ Kelurahan;
- h. menyusun program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/ Kelurahan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### **Seksi Kesejahteraan Sosial**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- b. Menyusun program dan pembinaan bidang kepemdaan, peranan wanita dan kegiatan olah raga;
- c. Menyusun program dan pembinaan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, seni dan kebudayaan;
- d. Menyusun program dan pembinaan bidang kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana;
- e. Melaksanakan penanggulangan dini penyakit masyarakat & bencana alam;
- f. Melaksanakan dan mengkoordinasi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- g. Melaksanakan inventarisasi dan fasilitas penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;
- h. Menyusun program dan pembinaan bantuan dan pelayanan sosial; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### **Seksi Pelayanan Umum**

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan penyelenggaraan pelayanan umum dan administrasi kepada masyarakat;
- b. menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- c. menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi wilayah;
- d. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;



## KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

- e. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### C. ISU STRATEGIS KECAMATAN SAMPANG

Sesuai dengan kerangka kerja penyusunan RPJMD, isu-isu strategis yang diuraikan dalam bab ini dirumuskan melalui analisis berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan terutama di bidang pelayanan. Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sampang perlu mendapat perhatian untuk menentukan rencana kedepan.

Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Suatu permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya untuk pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan**  
**Sasaran Perangkat Daerah**

No	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal	Kondisi sarana pelayanan yang kurang memadai	<b>Faktor Internal:</b> Keterbatasan SDM pada Kecamatan Sampang dalam melaksanakan fungsi pelayanan <b>Faktor Eksternal:</b> Kurang optimalnya kekuatan server pelayanan dari dinas terkait yaitu Dispendukcapil
		Nilai SKM belum memenuhi target yang direncanakan	<b>Faktor Internal:</b> Kondisi sarana pelayanan yang kurang memadai <b>Faktor Eksternal:</b>



## KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

			Pemahaman masyarakat yang berbeda terhadap prosedur pelayanan
2.	Gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	Tingkat Kriminalitas Masih Terlalu Tinggi	<b>Faktor Internal:</b> Keterbatasan SDM pada Kecamatan Sampang dalam melaksanakan Pengawasan dan Pengamanan Lingkungan <b>Faktor Eksternal:</b> Kondisi Perekonomian yang sangat sulit pasca terjadinya Pandemi Covid-19
3.	Tata kelola pemerintahan desa yang relative kurang baik	Pelayanan administrasi di desa kurang optimal	<b>Faktor Internal:</b> Keterbatasan SDM pada Kecamatan Sampang dalam melaksanakan Pembinaan <b>Faktor Eksternal:</b> Kurangnya pemahaman Perangkat Desa tentang Tugas pokok dan Fungsinya
4.	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan rendah	Tingkat Kehadiran dalam Musdes rendah	<b>Faktor Internal:</b> Kondisi geografis yang kurang mendukung <b>Faktor Eksternal:</b> Kurangnya Kesadaran Masyarakat tentang pentingnya pembangunan

### A. CASCADING KINERJA (Keterhubungan dengan RPJMD)

Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sampang, Kecamatan Sampang mendukung padapencapaian beberapa misi yaitu sebagai berikut :

1. Misi 4 yaitu :

**Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik ;**

Indikator kinerja Kecamatan Sampang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 merupakan indikator kinerja yang berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD tersebut. Pengintegrasian Perencanaan Kinerja (Cascading) Kecamatan Sampang Tahun 2019 - 2024 sebagai berikut :



## KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

### CASCADING KECAMATAN SAMPANG

#### Keterhubungan Perencanaan Kinerja (cascading) dengan RPJMD

#### Kab. Sampang Tahun 2019-2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Ket
Tujuan Renstra Perangkat Daerah Mengacu pada :										
Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Persentase Desa Maju	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Persentase Desa Maju	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1) Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase usulan program kegiatan pembangunan desa secara prioritas	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah usulan program kegiatan pembangunan desa yang difasilitasi	
					2) Persentase pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang difasilitasi			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah PKK desa binaan yang tertib administrasi	
									laporan hasil koordinasi PKK Tingkat Kecamatan	
								Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Pra musrenbangcam, musrenbangcam dan laporan musrenbangcam	
								Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat Yang Diberdayakan	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase permohonan administrasi layanan umum yang diproses	
					Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Pemeliharaan Fasilitas Umum	
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan administrasi masy. yang difasilitasi	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Jumlah Administrasi Umum Yang Di proses tepat waktu	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kualitas Tata Kelola Penataan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan perekonomian desa yang difasilitasi	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina administrasinya	Note Indikator sub kegiatan : fasilitas desa dapat berupa atk, mamin rapat, cetak penggandaanny
					Persentase Kualitas Tata Kelola Penataan Desa			Fasilitasi desa yang dibina administrasinya		
					Persentase Fasilitas desa yang dievaluasi APBDesnya			Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Dok. Evaluasi APBDes	Note Indikator sub kegiatan : yang dimaksud dok. evaluasi



## KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Ket
										APBDes disesuaikan dengan jumlah desa yang di evaluasi
									Jumlah Desa Yang Melaksanakan Pilkades	
								Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Yang Disusun		
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase desa dengan Satuan Perlindungan Masyarakat yang aktif	Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Siskamling Desa Aktif	
					Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Lapr Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok. Perencanaan PD (Renstra, Renja, SPIP)	
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dok. RKA-SKPD	
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dok. Perubahan RKA-SKPD	
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD	
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dok. DPPA-SKPD	
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dok. Evaluasi PD (LPPD, LKPI, SAKIP, RB)	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN	
								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK Kanto	
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok. Verifikasi Keuangan	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lapr. Keuangan Akhir Tahun SKPD	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lapr. Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
						Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan rekam jejak dan promosi jabatan ASN	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek implementasi perundang-undangan	
						Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD	
								Rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD pada SKPD	Jumlah laporan BMD	
						Administrasi Umum Perangkat	Persentase pengadaan barang	Presentase pengadaan barang penunjang kegiatan perangkat	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	



## KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

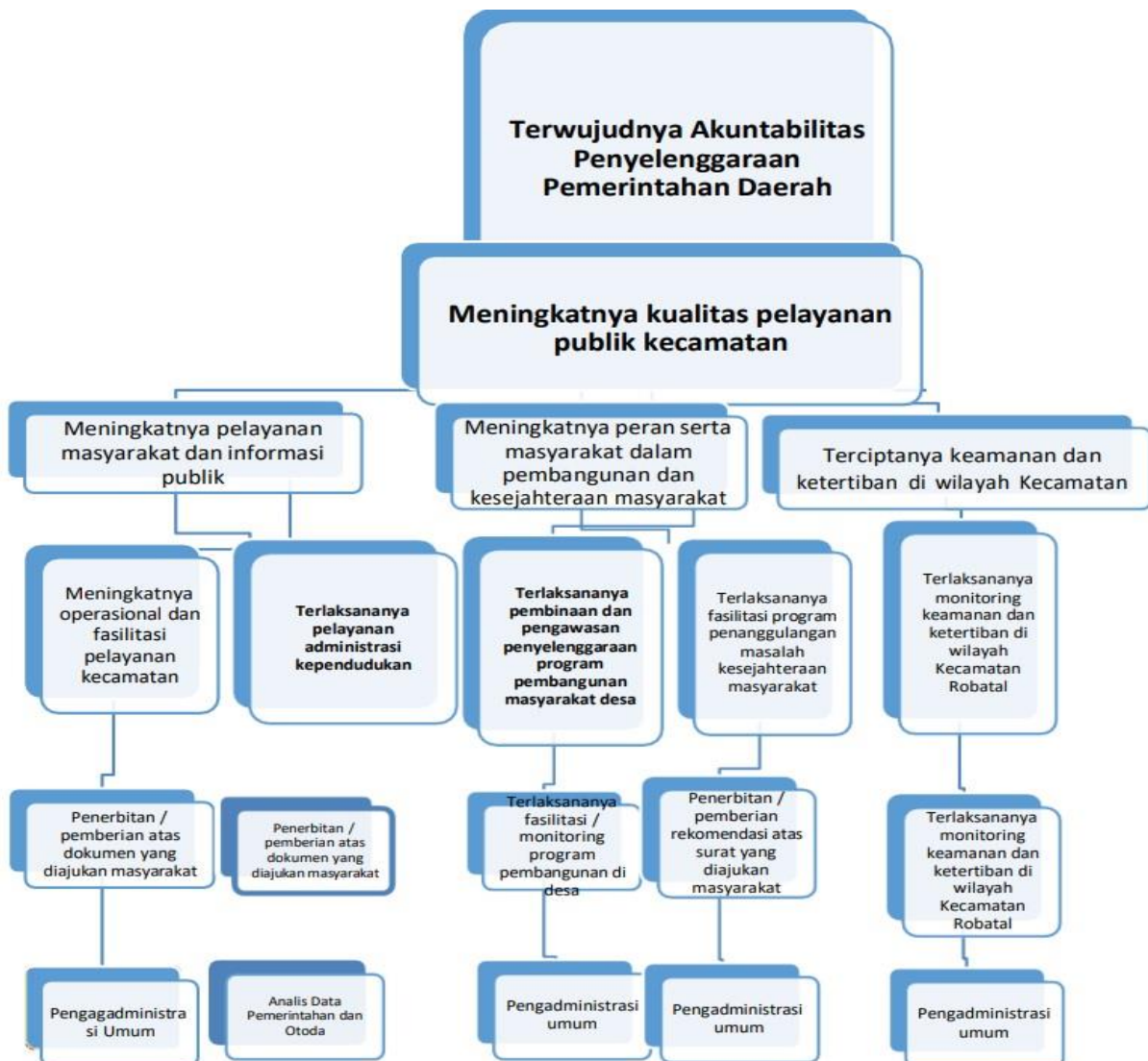
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Ket
							penunjang kegiatan perangkat			
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	
									Jumlah belanja pengadaan yang disediakan	
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Kunjungan Tamu	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Rapat	
									Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	
									Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	
									Jumlah kebutuhan BBM	
						Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas R4 yang disewa	
									Jumlah pengadaan kendaraan dinas R2	
								Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubilair	
								Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	
								Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	
						Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa perkantoran	Presentase penyediaan jasa perkantoran	Jumlah surat yang terkirim	
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	
									Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
									Jumlah tenaga kebersihan, tenaga administrasi dan tenaga waker	
						Jumlah tenaga kebersihan, tenaga administrasi dan tenaga waker	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabata	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	
									Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan perizinan kendaraan	
									Jumlah kendaraan dinas R4 yang disewa	
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	
									Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan perizinan kendaraan	
								Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan perizinan kendaraan	Jumlah Meubelair Yang Dipelihara	



## KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Ket
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yg dipelihara	
								Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
								Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	
									Jumlah Rehabilitasi Kantor	
						Penataan Organisasi	Presentase Fasilitasi Pelayanan Publik yang baik	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen SKM	
									Jumlah Promosi Pelayanan Publik Perangkat Daerah	

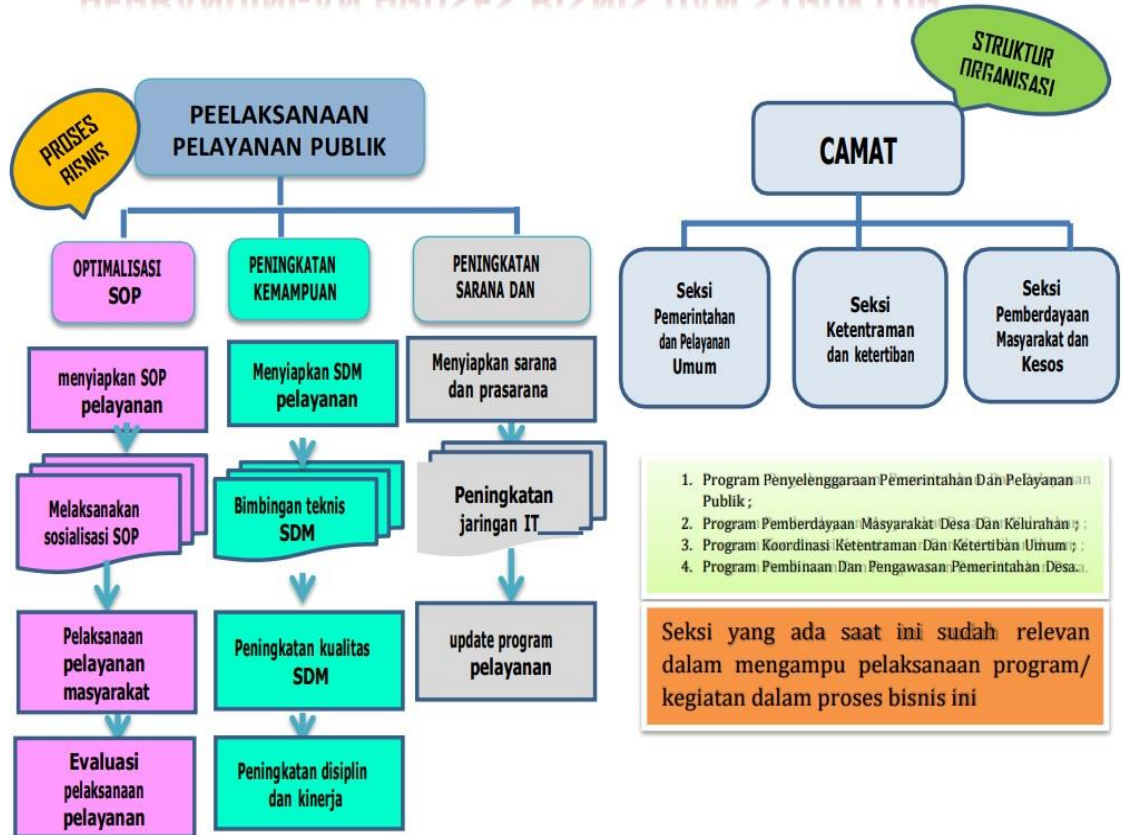
### B. PETA PROSES BISNIS







## PERBANDINGAN PROSES BISNIS DAN STRUKTUR



### D. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor : 065/450.41/434.100/2022 tanggal 02 November 2023, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

#### A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja telah memenuhi kriteria namun terdapat beberapa kondisi yang perlu diperhatikan yaitu :

- Rumusan tujuan belum berorientasi hasil
- Indikator tujuan hanya mengukur aspek pelayanan saja
- Indikator kinerja belum dapat diukur karena pelayanan di Kecamatan tidak relevan dengan indicator IKM

#### B. Pengukuran Kinerja



## **KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG**

1. Kualitas Pengukuran Pengukuran Kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi Informasi
2. Implementasi Pengukuran
  1. Tidak semua target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya setiap bulan
  2. Hasil pengukuran capaian kinerja belum dikaitkan dengan reward dan punishment
  3. IKU belum direviu secara berkala
- C. Pelaporan Kinerja Laporan kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya
- D. Evaluasi Internal
  1. Kualitas Pengukuran Evaluasi dan pemanfaatan atas pelaksanaan Rencana Aksi belum dilakukan.
  2. Pemanfaatan Pengukuran Hasil evaluasi Rencana Aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk nyata



**BAB II**

**PERENCANAAN KINERJA**

**A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2024**

Rencana Strategis Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. yang mengacu pada Visi Bupati Sampang **“SAMPANG HEBAT BERMARTABAT”**

Mengacu visi-misi Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang mendukung pada yakni sebagai berikut :

- 1. Misi 4 yaitu **Memperkuat tata kelola pemerintahan dan Desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan public**; dan mendukung pada pencapaian beberapa sasaran yakni sebagai berikut :

- 1. Sasaran 2 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan public;
- 2. Sasaran 3 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa;

Sehingga penjabaran atas sasaran RPJMD tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai Kecamatan Sampang dalam kurun waktu 2019 – 2024. Adapun Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sampang Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sampang Tahun 2019 - 2024**

MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL RENSTRA (2018)	TARGET						KONDISI AKHIR RENSTRA (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	-	-	-	64,00	67,00	70,00	71,00	71,00
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	-	-	-	57,00	71,00	85,00	100,00	100,00
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase kualitas tata kelola penataan desa	-	-	-	60,00	75,00	85,00	100,00	100,00



**B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Perjanjian kinerja pegawai aparatur sipil negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah dan ke samping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Kepala SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment);
- d. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.



## KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

Tabel 2.3

### Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kecamatan sampang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	81,75
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	100

No	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.940.100.274	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	19.954.690	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.048.897.034	
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	10.990.046	
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.600.000	
	<b>Total</b>	<b>12.028.542.044</b>	



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Tahun 2023 akan kami uraikan pada bagian ini. Dan agar memudahkan pemahaman, maka secara sistematis diuraikan tentang pengukuran capaian kinerja, diikuti dengan analisis capaian kinerja. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) harus berdasarkan pada indikator kinerja kegiatan yang meliputi : masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Oleh karena itu dalam penyusunan LKJIP tahun 2023 ini digunakan indikator-indikator sebagaimana dimaksud. Hasil perhitungan pengukuran kinerja Tahun Anggaran 2023 dapat digambarkan sebagaimana uraian dibawah ini.

#### **PELAYANAN PUBLIK**

Pengukuran kinerja sasaran sebagaimana dijelaskan dimuka disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke masa yang akan datang, secara teknis dapat dipergunakan untuk melihat performance masing-masing sub bagian yang ada dan untuk mengendalikan fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh. Dalam akuntabilitas kinerja akan diulas mengenai pengukuran kinerja kegiatan yang selanjutnya akan dapat diketahui juga pengukuran kinerja sasarannya dibandingkan dengan target tingkat capaian kinerja yang telah ditentukan. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang, Kecamatan Sampang memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih luas dengan melaksanakan pelayanan yang meliputi :

1. Pelayanan di bidang Umum ;
2. Pelayanan di bidang Pemerintahan dan Pelayanan Umum ;
3. Pelayanan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial ;
4. Pelayanan di bidang Ketentraman dan Ketertiban.



## KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

**Tabel 3.1**  
**Jenis Pelayanan**

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	WAKTU
1.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	engurusan Rekomendasi Proposal Bantuan Dana, Anak Cacat, Masjid, dll	Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang	10 Menit
2.	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Pembuatan Surat Keterangan Pindah Penduduk	Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No. 21 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan	20 menit
		Surat Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran	Surat Edaran Bupati Sampang Tanggal 23 Januari 2014 Nomor : 470/35/434.105/2014 tentang Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan	20 menit
		Pengurusan Surat Pernyataan Waris	Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang	25 menit
3.	Seksi Keamanan dan Ketertiban	Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang	10 menit
		Pengurusan Rekomendasi Surat Ijin Keramaian	Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang	10 menit
		Pengurusan Surat Keterangan Bersih Diri	Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang Kecamatan dan Kelurahan	10 menit
4.	Subag Umum dan Kepegawaian	Pengurusan Surat Keterangan dan legalisasi surat lainnya	Peraturan Bupati No 35 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang	10 menit

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Sampang Tahun 2023, sasaran yang telah ditetapkan dan diukur tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut :



## KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

**Tabel 3.2**  
**Perjanjian Kinerja Kecamatan Sampang Tahun 2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Meningkatnya tatakelola pemerintahan desa	Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	50%

a) Untuk Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik, memiliki uraian indikator sebagai berikut : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan Sampang pada tahun 2021 adalah 82,00 dan di tahun 2023 ditargetkan 82,00. Realisasi IKM pada tahun 2023 adalah 82,00 atau 93,32% dari target yang telah ditetapkan. Dengan demikian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tetap dari Tahun sebelumnya.

**Tabel 3.2**

### Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,00	86,00	82,00	82,00	82,00

Jika realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir Renstra (Tahun 2024), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

b) Untuk Tujuan 2 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dengan Sasaran 2 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa, memiliki uraian indikator sebagai berikut : Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik pada tahun 2022 adalah 50% sedangkan di tahun 2023 ditargetkan 50%. Namun Realisasi Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik pada tahun 2023 adalah 50% dari target yang telah





## KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

ditetapkan, hal ini dapat disimpulkan bahwa dari 12 Desa yang dibina Administrasi terdapat 6 desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Adapun kendala yang dihadapi adalah belum semua perangkat daerah melaporkan Penilaian Prestasi Kerja secara tepat waktu sehingga rekapitulasi data tidak optimal.

Upaya-upaya dalam rangka peningkatan kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

- Penerapan *reward and punishment* bagi ASN;
- Peningkatan disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang dengan cara pembinaan/pengawasan secara berkala dan pelaksanaan kegiatan sidak.

Jika realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya (3 tahun sebelumnya 2019-2021), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.3**

### Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas pelayanan public	ndeks Kepuasan Masyarakat	82,00	86,00	82,00	82,00	82,00
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase kualitas tata kelola penataan desa	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %

Jika realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir Renstra (Tahun 2024), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.4**

### Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA (2024)	REALISASI TAHUN 2023	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,55	82,00	97%
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase kualitas tata kelola penataan desa	100 %	50 %	50 %



## KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

Dari tabel 3.4 di atas dapat dijelaskan untuk tingkat kemajuan dari akhir Renstra Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang 2019-2024 dapat diperoleh hasil rata-rata baik. Jika realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi kinerja level nasional (benchmark kinerja), maka dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kerja Nasional**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI NASIONAL
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,00	-
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase kualitas tata kelola penataan desa	50 %	-

Perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Sampang dengan realisasi kinerja nasional pada tahun 2023 adalah nihil karena tidak tersedia data realisasi kinerja nasional.

**Tabel 3.6**  
**Alokasi per Sasaran Pembangunan**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	19.954.690	98%
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase kualitas tata kelola penataan desa	-	-

Dapat dijelaskan dari tabel diatas untuk persentase capaian anggaran dapat dihitung melalui anggaran pada masing - masing indikator kinerja dibagi dengan jumlah total belanja daerah, yaitu Rp. 11.417.426.067,00 (termasuk anggaran Sekretariat / Program Adum). Jadi kesimpulannya dapat diketahui persentase alokasi per sasaran pembangunan atau cost per outcome dari masing-masing sasaran strategis.

### B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

Urusan wajib Fungsi Penunjang Lainnya dilaksanakan oleh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dengan total anggaran sebesar Rp. 11.417.426.067,00,- dengan total terealisasi sebesar Rp. 11.139.655.566,00,- (97,57). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 5 (lima) program dan 32 sub kegiatan, dengan rincian berikut :



**KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG**

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2022**

Uraian	ANGGARAN	REALISASI	OUTPUT / KELUARAN				
			%	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
2	3	13 (6+9+12)	4	5	6	7	8
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>11.417.426.067,00</b>	<b>11.139.655.566,00</b>	<b>97,57</b>				
<b>PROGRAM PENUNJANG</b>	<b>9.451.514.341,00</b>	<b>9.198.914.316,00</b>	<b>93,02</b>				
<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>							
<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>							
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	<b>0,00</b>	Persentase Lapr Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	2 dok	2 dok	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	<b>0,00</b>	Jumlah Dok. RKA-SKPD	1 dok	1 dok	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	<b>0,00</b>	Jumlah Dok. Perubahan RKA-SKPD	1 dok	1 dok	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	0	<b>12,64</b>	Jumlah Dok DPA-SKPD	1 dok	1 dok	100
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	0	<b>0,00</b>	Jumlah Dok. DPPA-SKPD	1 dok	1 dok	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.195.172,00	0	<b>0,00</b>	Jumlah Dok. Evaluasi PD (LPPD, LKPJ, SAKIP, RB)	5 dok	5 dok	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.537.692.787,00	8.332.724.413,00	<b>93,04</b>	Gaji dan tunjangan pegawai	100 orang	100 orang	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	<b>0,00</b>	Jumlah CALK yang di selesaikan	1 dok	1 dok	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.681.796,00	13.605.400,00	<b>99,37</b>	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	18 macam	18 macam	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.303.111,00	64.947.341,00	<b>94,92</b>	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	8 macam	8 macam	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78.999.744,00	77.902.150,00	<b>98,22</b>	Jumlah alat tulis kantor yang di sediakan	19 macam	19 macam	100



## KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

Uraian	ANGGARAN	REALISASI	%	OUTPUT / KELUARAN			
				URAIAN	TARGET	REALISASI	%
2	3	13 (6+9+12)	4	5	6	7	8
Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	30.126.518,00	27.889.700,00	84,43	Jumlah barang cetakan yang disediakan	100 buku	100 buku	100
				Jumlah penggandaan yang disediakan	33000 lembar	33000 lembar	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,00	10.950.000,00		Jumlah bahan bacaan yang disediakan	87 eksemplar	87 eksemplar	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.311.020,00	4.310.000,00	94,92	Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Kunjungan Tamu	12 bulan	12 bulan	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.390.500,00	85.568.000,00	99,17	Jumlah BBM	1440 liter	1440 liter	100
				Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Rapat	600 orang	588 orang	100
				Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	80 kali	71 kali	100
				Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	24 kali	24 kali	100
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.000.000,00	63.600.000,00	90,26	Pengadaan sewa mobil dinas	1 unit	1 unit	100
Pengadaan Mebel	37.481.300,00	36.542.000,00		Pengadaan mebel	27 unit	27 unit	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.906.380,00	30.850.000,00	95,06	Pengadaan Komputer dan printer	15 unit	15 unit	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.828.551,00	6.721.500,00	97,09	Jumlah surat yang terkirim	1.500 surat	1.345 surat	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.177.575,00	101.592.742,00	76,40	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	12 bulan	12 bulan	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	189.000.000,00	189.000.000,00	100	Jumlah tenaga honorer daerah	2 orang	2 orang	100
				Jumlah tenaga keamanan	8 orang	8 orang	100
				Jumlah tenaga keamanan	9 orang	9 orang	100



## KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

Uraian	ANGGARAN	REALISASI	OUTPUT / KELUARAN				
			%	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
2	3	13 (6+9+12)	4	5	6	7	8
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.150.500,00	3.185.000,00	32,24	Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan perizinan kendaraan	50 unit	17 unit	100
Pemeliharaan Mebel	3.200.000,00	2.500.000,00	97,33	Jumlah Meubelair Yang Dipelihara	80 unit	77 unit	97
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.390.000,00	18.135.000,00	96,86	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yg dipelihara	27 unit	27 unit	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	126.199.559,00	125.216.070,00	99,87	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	7 unit	7 unit	30
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3.675.000,00	3.675.000,00	57,12	Jumlah Promosi pelayanan Publik Perangkat Daerah	1 kali	1 kali	100
<b>PROGRAM</b>	<b>14.878.751,00</b>	<b>14.700.000,00</b>	<b>48,96</b>				100
<b>PENYELENGGARAAN</b>							100
<b>PEMERINTAHAN DAN</b>							100
<b>PELAYANAN PUBLIK</b>							
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14.878.751,00	14.700.000,00	48,96	Jumlah permohonan administrasi layanan umum yang diproses	1 tahun	1 tahun	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN</b>	<b>1.942.432.975,00</b>	<b>1.917.441.250,00</b>	<b>99,05</b>				
<b>MASYARAKAT DESA DAN</b>							
<b>KELURAHAN</b>							
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	30.084.174,00	27.697.000,00	92,04	Jumlah usulan program kegiatan pembangunan desa yang difasilitasi	18 desa / kel	14 desa / kel	100
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	37.734.474,00	36.422.500,00	93,29	Jumlah PKK desa binaan yang tertib administrasi	18 desa / kel	14 desa / kel	100
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.874.614.327,00	1.853.321.750,00	99,16	Jumlah Masyarakat Yang Diberdayakan	6 kelurahan	6 kelurahan	100
<b>PROGRAM KOORDINASI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>KETENTRAMAN DAN</b>							



## KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

Uraian	ANGGARAN	REALISASI	OUTPUT / KELUARAN				
			%	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
2	3	13 (6+9+12)	4	5	6	7	8
<b>KETERTIBAN UMUM</b>							
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0	0		Jumlah Satlinmas Desa yang Aktif	18 desa / kel	14 desa / kel	100
<b>JUMLAH</b>	<b>11.417.426.067,00</b>	<b>11.139.655.566,00</b>	<b>97,57</b>				

Berdasarkan tabel diatas secara umum target kinerja tahun 2023 pada masing-masing program telah berhasil dicapai, terlihat dengan nilai rata-rata capaian kinerja yang mencapai diatas 97,57%. Hal ini menggambarkan bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, namun keluaran dan hasilnya belum efektif dalam mencapai target sasaran yang ditetapkan dan belum signifikan di rasakan oleh masyarakat.

Pada periode selanjutnya diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap pemilihan program dan kegiatan yang dilaksanakan, agar dapat dipilih program dan kegiatan hanya yang benar-benar berkontribusi langsung terhadap pencapaian target sasaran strategis saja yang bisa dirasakan dengan baik oleh masyarakat.

Demikian pula halnya dengan penyerapan anggaran, terlihat bahwa secara umum terealisasi lebih dari 97,57%, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan sudah dapat dilaksanakan secara efisien, terlihat dari serapan anggaran yang mencapai 97,57%. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa serapan anggaran yang terlalu rendah juga dapat mengindikasikan kemungkinan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga perlu ditelusuri secara lebih cermat untuk kemudian dilakukan analisis pemecahan masalah agar tahun anggaran selanjutnya tidak terulang.

### C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Beberapa upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

#### A. Perencanaan Kinerja

1. Menyempurnakan peta proses yang ada dengan mencermati kembali hal-hal yang seharusnya dilakukan untuk mewujudkan tujuan Kecamatan Sampang dan menjadikannya



## **KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG**

sebagai dasar penyusunan cascading kinerja serta evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah.

2. Berkoordinasi dengan Bappelitbangda Kabupaten Sampang dalam perumusan tujuan dan indicator tujuan yang berorientasi pada hasil
- B. Pengukuran Kinerja
1. Telah diupayakan tindak lanjut pengukuran kinerja dalam bentuk evaluasi internal terhadap kinerja eselon III dan IV setiap bulannya.
  2. Punishment diberikan kepada ASN berupa pemotongan TPP sesuai ketentuan.
  3. Reviu IKU dilaksanakan setiap triwulan dalam bentuk evaluasi internal setiap seksi dan sub bagian.
- C. Pelaporan Kinerja Pelaporan kinerja diupayakan menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara lengkap dengan basis data yang memadai.
- D. Evaluasi Internal Pemantauan Rencana Aksi secara berkala setiap triwulan telah dilaksanakan dalam mengendalikan kinerja dan ditindaklanjuti sehingga menunjukkan perbaikan setiap periode.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Penetapan indikator-indikator kinerja yang dicapai sebagai acuan tingkat keberhasilan pencapaian kebijakan, program dan kegiatan diperoleh dari pandangan dan pemikiran yang didasarkan pada fungsi-fungsi yang ada pada lingkungan organisasi Kantor Kecamatan Sampang.

Pengukuran kinerja ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran yang bersifat berkelanjutan, sehingga perlu terus dikaji dan dievaluasi agar dapat diperoleh indikator-indikator kinerja yang benar-benar realistis.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Tahun 2023, semoga dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja Kecamatan Sampang dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan anggaran Tahun 2023. Untuk itu pula dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang





**KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG**